



Tanggungjawab atas Kasus KONI Dianggap Selesai

PONTIANAK—Koordinator Wilayah Kalbar IA Badan Pemeriksa Keuangan RI, N Diva Mahaendra menyatakan tanggungjawab BPK RI terhadap kasus bantuan sosial Pemprov Kalbar kepada KONI telah selesai. Saat ini instansi tersebut hanya menangani bansos Pemprov Kalbar kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura tahun 2006, 2007, dan 2008.

"Bansos KONI sudah selesai. Kewenangan kami hanya sampai penghitungan kerugian negara dan memberikan

keterangan ahli untuk peradilan. Itu sudah dilakukan," ujar

Diva, didampingi Korwil 3 Kalbar IB BPK RI, Ailando Siregar, Kepala Sub Auditorat Kalbar 2 BPK RI, Joni Rendra P, kepada sejumlah wartawan di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (10/12).

Secara rinci Diva menjelaskan awal mulai terjadinya kasus bantuan sosial adalah dari hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan pada 2009. Melalui proses yang ada, Ketua BPK melimpahkan kasus tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi karena adanya dugaan atau indikasi tindak pidana korupsi. "Dalam proses berjalan, KPK melimpahkan kasus ini ke Polda Kalbar," katanya.

Menurut Diva, bansos yang dilimpahkan ke KPK ada empat temuan. Tiga temuan menyangkut dana bantuan sosial ke KONI Kalbar tahun 2007, 2008, dan 2009. Satu temuan terkait dana bantuan sosial

Provinsi Kalbar ke Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan tahun 2006, 2007, dan 2008. "Permintaan atas hasil penghitungan negara dilakukan oleh pemohon, dalam hal ini Polda Kalbar.

"Bansos KONI sudah selesai. Kewenangan kami hanya sampai penghitungan kerugian negara dan memberikan keterangan ahli untuk peradilan. Itu sudah dilakukan"

Diva Mahaendra



• ke halaman 15 kolom 1



Tanggungjawab atas Kasus KONI Dianggap Selesai

Sambungan dari halaman 9

Sesuai ketentuan peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010, ungkap Diva. Terkait kasus KONI, lanjut Diva, setelah proses penyidikan Polda Kalbar mengajukan kepada BPK agar dilakukan penghitungan kerugian negara atas kasus tersebut.

BPK pun melaksanakannya sesuai dengan mekanisme yang ada, mulai dari paparan, adanya tim yang melakukan telaahan, dan lainnya. Kemudian baru bisa dilaksanakan penghitungan kerugian negaranya. Akhirnya pada tahun 2012, BPK RI secara resmi menyampaikan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah kepada Kepolisian Daerah Kalbar. Laporan ini diberikan melalui surat nomor 20/S/VIII/03/2012 tanggal 30 Maret 2012 perihal Hasil Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan TPK Dana Bansos KONI TA 2007, 2008 dan 2009 pada Pemprov Kalbar.

"Sudah berproses, masuk peradilan, dan sudah kita berikan keterangan ahli. Jika bertanya lagi masalah KONI, sudah selesai," ungkap Diva. Ia menjelaskan BPK RI tidak

bisa menyebutkan nominal hasil penghitungan kerugian tersebut. Karena berdasarkan UU KIP, informasi dalam proses hukum tidak bisa diberikan kepada publik atau tidak bisa dipublikasikan.

Kemudian, lanjut Diva, dimulai lagi tahap penyelesaian temuan lainnya yakni terkait bansos ke Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN. Ketua BPK menyerahkan hasil pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas pertanggungjawaban

penggunaan belanja ban- tuan sosial tahun anggaran 2006, 2007, dan 2008 pada Pemprov Kalbar dengan LHP No.23/HP/XIX.PNK/09/2009 tanggal 15 September 2009 ke KPK, melalui surat nomor 08/R/S/IVIII/01/2010 tanggal 14 Januari 2010. Oleh KPK, lanjut Diva, proses hukum terkait temuan pemeriksaan tersebut dilimpahkan kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Kepolisian Daerah Kalbar melalui surat Nomor B/62/IV/2011/Kimsus-IV tanggal 20 April 2011 meminta Perhitungan Kerugian Keuangan Negara kepada BPK RI.

Kemudian pada 1 November 2012, Kepolisian Daerah Kalbar melalui su-

rat nomor B/549/XI/2012/Dit Reskrimsus-III kembali menyampaikan Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas dugaan penyimpangan penyalahgunaan dana Dewan Pembina Fakultas Kedokteran UNTAN tahun 2006 sampai 2008.

Pada 30 November 2012, Kepolisian Daerah Kalbar, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit III/Tipikor melakukan pemaparan Hasil Penyidikan Perkar Dugaan Penyimpangan atas Pengu- naan Dana KONI Kalbar dan Dana Dewan Pembina

Fakultas Kedokteran UNTAN TA 2006 sampai 2008 kepada BPK RI. Berdasarkan hasil pemaparan, BPK RI melalui surat nomor 240/S/XIX.PNK/12/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang dituju- kan kepada KPK (tembusan Kepala

Kepolisian Daerah Kalbar) menyampaikan bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat masih dalam posisi menunggu kelengkapan bukti yang sedang dikum- pulkan oleh Penyidik Polda Kalimantan Barat. Dokumen bukti tersebut terkait dugaan kerugian keuangan negara

terkait bantuan sosial Fakultas Kedokteran Untan Tahun 2006 hingga 2008, dan Pinjaman DPRD kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat ahun 2006, 2007, dan 2008.

Kemudian BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar melalu- lui surat nomor 132/S/XIX.PNK/10/2013 tanggal 24 Ok- tober 2013 kepada Kepolisian Daerah Kalbar menjelaskan sampai saat ini Kepolisian Daerah Kalimantan Barat be- lum melengkapidokumen dan bukti pendukung, sehingga BPK RI belum dapat melanj- utkan proses penghitungan kerugian keuangan negara.

"Kami belum memiliki keyakinan yang memadai atas kasus (bansos ke FK Un- tan), yang dimintakan untuk penghitungan kerugian ini. Makanya kami meminta do- kumen atau bukti tambahan," jelas Diva.

Ia menambahkan BPK RI terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. "Memang kami melihat ada pemberitaan yang kurang ber-imbang. Saya tidak bisa cerita apa dokumennya (dokumen atau bukti tambahan). Posisi kami lebih banyak menung- gu," ungkapnya. (uni)